

Itwasum Polri Audit PNBP 2025 di Jajaran Polda NTB, Polresta Mataram Jadi Tuan Rumah

Syafruddin Adi - NTB.NEWSPAPER.CO.ID

Feb 12, 2025 - 18:21



Mataram, NTB – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri melakukan Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 di jajaran Polda NTB. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Wira Pratama, Polresta Mataram, pada

Rabu (12/02/2025).

Audit kali ini melibatkan empat Polres/ta, yakni Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Tengah, dan Polres Lombok Utara, yang dihadiri langsung oleh para Kapolres masing-masing.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari masing-masing Kapolres di hadapan Tim Itwasum Polri sebelum proses audit dimulai. Dalam keterangannya kepada media, Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara, S.H., S.I.K., M.M., CPHR., CBA., CHRM., menegaskan bahwa audit ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Ini menjadi bentuk keterbukaan Polri dalam mengelola anggaran. Setiap satuan kerja harus bertanggung jawab atas penggunaan dana, khususnya dalam penerimaan dan pengelolaan PNBP," ujarnya.

Menurutnya, PNBP memiliki peran krusial dalam mendukung operasional kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, audit ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

"Kami berharap proses audit ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP, sehingga pelayanan kepolisian semakin optimal," tutupnya.

Sesuai arahan dari Tim Itwasum Polri, audit ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk mekanisme penerimaan PNBP di masing-masing Polres/ta.

Dengan adanya audit ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Polda NTB dapat terus meningkatkan standar pengelolaan keuangan, guna mendukung operasional kepolisian yang lebih efektif dan profesional. (Adb)